

DIK RUTIN



LAPORAN KEGIATAN

**DAMPAK POLITIK KOLONIAL ETIS TERHADAP
TINGKAT KEMAKMURAN PENDUDUK DI
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1900-1930**

Oleh:
Dra. Siti Maziyah, M.Hum.
Dra. Endah Sri Hartatik, M.Hum.

Dibiayai dengan DIPA Universitas Diponegoro Nomor: 061.0/23-4.0/XIII/2005 Kode 5584-0036 MAK 521114, sesuai dengan Perjanjian Tugas Pelaksanaan Penelitian Para Dosen Universitas Diponegoro, Nomor Kontrak: 07A/JO7.11/PG/2005, tanggal 10 Mei 2005

**PUSAT PENELITIAN SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOVEMBER, 2005**

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Reft: 468/14/10mbk/c

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DIK RUTIN**

1. a. Judul Penelitian : **Dampak Politik Kolonial Etis terhadap Tingkat Kemakmuran Penduduk di Kabupaten Grobogan Tahun 1900-1930**
b. Bidang Ilmu : **Sosial**
c. Kategori : **Pengembangan Ilmu Pengetahuan**
2. Ketua Peneliti :
a. Nama Lengkap & Gelar : **Dra. Siti Maziyah, M.Hum.**
b. Jenis Kelamin : **Perempuan**
c. Pangkat/Gol/NIP : **Lektor/III B/132 096 082**
d. Jabatan Fungsional : **Penata Muda Tk. I**
e. Fakultas/Jurusan : **Pusdi Sejarah dan Budaya Maritim Asteng Lemlit UNDIP**
f. Bidang Ilmu : **Sosial**
3. Jumlah Tim Peneliti : **2 (dua) orang**
4. Lokasi Penelitian : **Kabupaten Grobogan**
3. Kerjasama dengan institusi lain:
a. Nama : **-**
b. Alamat : **-**
6. Jangka Waktu Penelitian : **6 (enam) bulan**
7. Biaya yang dibutuhkan : **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**

Semarang, 10 November 2005

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian Sosial dan Budaya
Lemlit Universitas Diponegoro

Dr. Mudjahirin Thohir, M.A.
M.Hum.
NIP. 131 124 440

Ketua Peneliti

Dra. Siti Maziyah,
NIP. 132 096 082



Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP

Prof. Dr. Ignatius Riwanto, Sp. Bd
NIP. 130 529 454

ABSTRAK

Penelitian historis tentang dampak kebijakan kemakmuran penduduk di Kabupaten Grobogan pada masa kolonial membutuhkan ketekunan dan kesabaran yang sangat luar biasa, karena sumber yang didapat menggunakan bahasa Belanda. Hanya sedikit sumber yang ditemukan dari berbagai perpustakaan tersebut yang menggunakan bahasa Indonesia. Sumber-sumber tersebut berupa Koloniaal verslag, Gewestelijke Blad, Surat keputusan Residen dan lain sebagainya. Data-data yang terkumpul terutama tentang kebijakan pemerintah kolonial tentang system irigasi, kredit rakyat berupa gadai, penyakit dan angka melek huruf. Data tersebut mash dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian, hanya data tersebut belum dapat secara lengkap ditemukan karena sebagian masih dipesan di perpustakaan di Yogyakarta antara lain Ignatius Kotabaru dan Hatta Foundation. Akan tetapi paling tidak 60 persen data sudah terkumpul. Penelitian di kabupaten Grobogan sudah dilakukan dengan membuat dokumentasi bangunan peninggalan pemerintah Belanda yang berupa lembaga gadai, saluran irigasi, perbaikan jalan dan saluran air minum dari sumber air di kabupaten Grobogan yang dibangun masa kolonialisme Belanda. Dokumentasi tersebut digunakan untuk mendukung deskripsi dari sumber tertulis yang ditemukan.

DAMPAK POLITIK KOLONIAL ETIS TERHADAP TINGKAT KEMAKMURAN PENDUDUK DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1900-1930

Oleh

Siti Maziyah dan Endah Sri Hartatik

2005; 50 halaman

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Permasalahan penelitian yang diangkat adalah untuk mengkaji apakah setelah adanya perubahan politik di dalam menangani masyarakat pribumi, yaitu adanya perubahan politik konservatif menjadi politik etis, pemerintah kolonial dapat lebih memakmurkan penduduk pribumi pada umumnya?

Adapun tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran masyarakat Grobogan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20; mendeskripsikan tentang usaha-usaha penanggulangan kemiskinan di wilayah Grobogan dari tahun 1900 –1930; dan menganalisis tingkat kemakmuran penduduk wilayah Grobogan pada tahun 1900-1930

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode ini dimulai dengan pencarian sumber-sumber sejarah baik berupa data primer yang berupa laporan dari pemerintah kolonial maupun sumber sekunder yang telah tercekap berupa buku atau majalah sejaman yang diperoleh di perpustakaan-perpustakaan Yogyakarta, maupun di Semarang. Setelah dilakukan kritik sumber, data-data itu kemudian dianalisis untuk selanjutnya dibuat historiografi.

Penelitian historis tentang wilayah Kabupaten Grobogan masa kolonial ini merupakan salah satu riset yang tidak hanya berlaku pada jamannya terutama dalam usaha pemerintah berusaha meningkatkan

kemakmuran penduduknya akan tetapi dapat digunakan sebagai sumber acuan bagi pemerintah sekarang dalam mengatasi masalah yang sama sesuai dengan masa sekarang. Usaha pemerintah kolonial tersebut antara lain dalam bidang sosial kemasyarakatan yaitu kredit, perbaikan kesehatan, jaringan jalan dan lain sebagainya. Usaha-usaha itu tentu saja secara tingkat keberhasilannya bervariasi, akan tetapi usaha pemerintah kolonial ini menunjukkan bahwa sudah usaha ada perbaikan tingkat kemakmuran penduduk di wilayah ini. Adapun saran yang dapat kami lakukan adalah mudah-mudahan riset historis tentang wilayah ini dapat dijadikan bahan pembandingan atau acuan bagi pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengantisipasi kemiskinan penduduknya

SUMMARY

This research to try to answer problem about change of political system in the period of colonial. Was the change of political system, from conservativ to etic politic, can change of prosperity indigenous inhabitant?

Aim this research to describe the level of prosperity indigenous inhabitant in Grobogan at 19 and 20 centuries; to describe efforts prevention slum area in Grobogan from 1900 to 1930; and analyzed level of prosperity indigenous inhabitant in Grobogan at 1900-1930.

This research used historical method, who had four stages. First, look for the datas; critical resources; analized; and historiography.

Historical research about Grobogan regency in colonial period is research who can used for grow up prosperity inhabitant did not at the last time, but can used as reference for government at this time. The effort of colonial government was credit, healthy improvement, route, and so on.

PUSAT PENELITIAN SOSIAL BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Dibiayai oleh Dana DIK RUTIN/DIPA 5584 Universitas Diponegoro Semarang Dengan Nomor Kontrak: 07A/JO7.11/PG/2005 Tahun 2005

PRAKATA

Kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT., atas selesainya penyusunan laporan kegiatan penelitian yang berjudul "DAMPAK POLITIK KOLONIAL ETIS TERHADAP TINGKAT KEMAKMURAN PENDUDUK DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 1900-1930" ini.

Pelaksanaan pekerjaan ini dapat berjalan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak, baik lembaga-lembaga maupun perorangan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan pekerjaan penelitian ini.
2. Ketua Pusat Penelitian Sosial dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro yang telah menyetujui dan merekomendasi dilakukannya kegiatan penelitian ini.
3. Berbagai instansi, lembaga, dan perorangan yang telah membantu kelancaran tugas pelaksanaan kegiatan penelitian ini dan pembuatan laporan penelitian.

Mudah-mudahan laporan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan informasi dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pijakan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Jika terdapat kekurangan-kekurangan di dalam penelitian ini, mudah-mudahan dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya.

Semarang, 10 November 2005

Tim Peneliti

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbandingan Penduduk Demak dan Grobogan 1830-1905	21
Tabel 2 Prosentase Angka Kelahiran dan Kematian	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Sumber Air Moedal di Distrik Wirosari	30
Gambar 2 Saluran air di distrik Wirosari, <i>Afdeeling</i> Grobogan	31
Gambar 3 Konperensi Distrik di Kradenan, <i>Afdeeling</i> Grobogan 1905	42

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
PRAKATA	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
IV. METODE PENELITIAN	13
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I PENDAHULUAN

Sejak tahun 1870, haluan politik kolonial di Hindia Belanda beralih dari politik kolonial konservatif menjadi politik kolonial liberal. Perubahan haluan politik ini membawa konsekuensi peningkatan peran swasta dalam bidang ekonomi (Burger, 1962: 205-206). Perkebunan-perkebunan swasta Barat, Belanda, di pedalaman Jawa berkembang secara cepat dengan memperoleh keuntungan yang besar bagi pengusaha dan pemerintah karena kebijakan politik liberal ini. Anne Booth mengemukakan bahwa masa itu merupakan babak baru bagi pertumbuhan ekonomi kolonial. Akselerasi ekspor meningkat secara cepat, dan meskipun nilai ekspor menurun, pendapatan dari sektor perdagangan, meningkat sekitar 4% pertahun hingga tahun 1880-an (Booth, 1988: 113-114).

Pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda itu ternyata tidak serta merta dinikmati oleh penduduk bumi putera yang sebagian besar tinggal di pedesaan dan bertumpu dari sektor pertanian subsistensi. Justru yang terjadi sebaliknya, ketika perekonomian Hindia Belanda mengalami pertumbuhan yang mengesankan, penduduk bumi putera mengalami penurunan kemakmuran. Isu tentang penurunan tingkat kemakmuran (*mindere welvaart*) masyarakat di pedesaan Jawa secara cepat tersebar dan mendapat perhatian serius baik dari kalangan pers, maupun parlemen di Eropa.

Brooshooff, seorang wartawan dari surat kabar *De Locomotief* di Semarang mengemukakan bahwa rakyat Jawa telah mengalami kemunduran kemakmuran sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan jalan menurunkan beban pajak kepada penduduk dan perbaikan sarana infra struktur. Reaksi yang serupa juga dilontarkan oleh C.Th. van Deventer seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia (1880-1897), pada tahun 1899 ia menerbitkan sebuah artikel yang diberi judul

"*Een Eereschuld*" (Suatu Hutang Kehormatan) dalam majalah *de Gids*. Dalam tulisannya tersebut ia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia atas semua kekayaan yang pernah di peras dari Hindia Belanda. Untuk hal itu maka suatu kewajiban pemerintah Belanda membayar hutang dalam bentuk kebijakan kolonial yang memihak penduduk bumi putera.

Sementara itu Partai Protestan yang memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum di Belanda pada tahun 1891 juga mengkritik kebijakan kolonial yang mengakibatkan penderitaan penduduk Hindia Belanda. Mereka mendorong Pemerintah Hindia Belanda agar melakukan politik yang lebih memperhatikan kesejahteraan penduduk bumi putera (Ricklefs, 1991: 228).

Isu itu direspon oleh pemerintah kolonial dengan mengadakan penyelidikan tentang kemunduran kemakmuran penduduk di pedesaan Jawa dalam suatu komisi yang dikenal dengan *mindere welvaart commissie* yang dilakukan pada tahun 1904 (Suryo, 1984: 3). Berdasarkan hasil laporan yang dilakukan tersebut maka dapat digambarkan bahwa kondisi perekonomian daerah jajahan khususnya pedesaan Jawa pada penghujung abad ke-19 menunjukkan ketimpangan. Salah satu indikator yang menonjol dari penurunan kemakmuran adalah menurunnya konsumsi beras. Pada tahun 1880-an, konsumsi beras perkapita penduduk Jawa 120 kg/tahun, namun pada tahun 1900 menurun menjadi 103 kg/tahun (Booth, 1988:114).

Kemunduran tingkat kemakmuran penduduk di Jawa disebabkan oleh beberapa hal antara lain adalah pesatnya perkembangan perkebunan besar yang menyebabkan produksi tanaman ekspor meningkat secara signifikan dibandingkan pada masa sebelumnya, akan tetapi, dilain pihak terjadi penurunan jumlah produksi tanaman pangan apabila dibandingkan dengan angka kenaikan jumlah penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Pulau Jawa berjalan lebih cepat daripada pertumbuhan bahan pangan yaitu beras, sehingga

konsumsi bahan pangan perkepala menurun terutama sesudah tahun 1880 (Booth, 1988: 115). Sebab lain yang berhubungan dengan penurunan kemakmuran itu adalah terjadinya penurunan harga komodite gula dan kopi di pasaran internasional yang pada masa sebelumnya mendatangkan keuntungan besar karena harganya tinggi. Penurunan harga terutama gula (krisis gula), disebabkan oleh pemakaian gula *bit* yang mulai memasuki perdagangan dunia dengan harga yang relatif lebih murah. Krisis penurunan impor gula dari Indonesia ini mendatangkan kemerosotan usaha perkebunan tebu dan bank-bank yang mensponsorinya. Dampak yang dirasakan penduduk adalah semakin menyempitnya kesempatan kerja di sektor perkebunan karena pengusaha perkebunan mengambil kebijakan menurunkan produksi tanaman ekspor. Penurunan produksi perkebunan itu telah menyebabkan kemerosotan pendapatan penduduk baik berupa upah kerja dan sewa tanah di daerah perkebunan. Kondisi ini diperburuk juga oleh impor beras dari luar negeri yang mengakibatkan harga beras dalam negeri menurun, impor lain adalah hasil kerajinan tangan di pasaran lokal yang turut menurunkan pendapatan penduduk sejak tahun 1870. Robert van Niel berpendapat bahwa pada dasarnya politik kolonial liberal melindungi petani dari pengaruh ekonomi uang, tetapi disisi lain kesejahteraan penduduk di pulau Jawa justru mengalami penurunan karena ketidakmampuan untuk memperbaiki ketidakadilan sosial ekonomi dan bertambahnya konsumsi yang dibutuhkan (van Niel, 1984: 19).

Menurunnya tingkat kemakmuran penduduk di Jawa pada akhir abad ke-19 pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak seimbang dengan kenaikan produksi pangan. *Kedua* Sistem Tanam Paksa dan Kerja Paksa (*heerendiensten*) hasilnya tidak dapat dinikmati oleh penduduk, tetapi juga menimbulkan kepincangan administrasi (korupsi, pemerasan, kecurangan lain) oleh pejabat yang merugikan penduduk. *Ketiga*, pada periode abad ke-19 Jawa telah menanggung beban finansial untuk

mengatur pemerintahan daerah luar Jawa (*furden of empire*) (Suryo, 1984: 7 dan SNI Jilid IV: 17).

Seperti halnya daerah pedesaan Jawa yang lain penurunan tingkat kemakmuran penduduk di Kabupaten Grobogan sudah terjadi sejak Sistem Tanam Paksa. Gambaran tentang penurunan tingkat kemakmuran tersebut dapat dilihat dalam hasil penelitian Elson. Berdasarkan hasil penelitian Elson yang diterbitkan pada tahun 1985 di jelaskan bahwa penurunan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Demak dan Grobogan disebabkan oleh banyak faktor antara lain adalah (1) kombinasi dari keadaan alam yang tidak menguntungkan dengan hasil panen buruk serta meluasnya wabah penyakit, (2) proporsi pertumbuhan angkatan kerja dan lapangan kerja yang tidak sebanding, (3) tingginya pajak yang dikenakan kepada penduduk akibat sistem penanaman tembakau yang merugikan, (4) korupsi yang merajalela di kalangan elite desa dan (5) ketidakmampuan penduduk dalam mengatur pengadaan bahan pangan pada masa paceklik (Elson dalam Booth, 1988:38-73).

Tulisan tentang wilayah Kabupaten Grobogan umumnya terfokus pada periode abad ke-19, periode awal abad ke-20 hingga menjelang kemerdekaan Indonesia belum mendapatkan kajian secara khusus, padahal periode ini juga penting karena dapat digunakan untuk memahami kehidupan masyarakat pedesaan Jawa karena dalam periode ini ada sejumlah usaha pemerintah kolonial untuk meningkatkan kemakmuran penduduk Jawa, meskipun hasilnya bervariasi untuk setiap wilayah.

Bencana kelaparan yang paling serius di Kabupaten Demak dan Grobogan terjadi pada tahun 1849-1850 dan 1957, bencana ini mengakibatkan banyak penduduk yang meninggal dan melakukan migrasi ke daerah lain, misalnya ke Kudus dan Jepara. Djoko Suryo menambahkan perpindahan dan kelaparan itu selain disebabkan oleh faktor alamiah, tetapi disebabkan juga oleh faktor *mal administrasi* di tingkat pedesaan (Suryo, 1988:82-83).

Sejalan dengan perubahan haluan politik Pemerintah Kolonial Liberal menjadi *Politik Kolonial Etis* pada awal abad ke-20, di pedesaan Jawa, termasuk Kabupaten Demak dilaksanakan kebijakan kemakmuran (*welfare policy*). Kebijakan itu meliputi pengembangan pendidikan, pembangunan sarana irigasi, riset dan perluasan usaha tani, kredit pedesaan, dan perbaikan kesehatan masyarakat. Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat pedesaan.